

DEMOKRASI EKONOMI

Dosen: Ngadiyono, M.Pd

Kelompok 3



Solicha Ernawati	15804241005
Elys Sastika Tambunan	15804241008
Zakiyatul Hikmah	15804241020
Bety Cahyaning Lestari	15804241022
Nesi Yuliasari	15804241040
Imaduddin Ala'yuni	15804241046

- ▶ Pembangunan ekonomi didasarkan pada Demokrasi Ekonomi bagian integral Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat sebagai pengamalan Pancasila.



Penjabaran Demokrasi Ekonomi

**Sistem Perekonomian
Indonesia**

berdasarkan atas
Demokrasi Ekonomi



Berlandaskan pada

UUD 1945 Pasal 33

Undang-undang Dasar 1945

Pasal 33

Menyatakan bahwa :

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

❖ 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

❖ 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Program Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi

1. Pembangunan nasional saat ini telah menciptakan landasan untuk berkembangnya sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi
2. Pemantapan sendi-sendi dasar sistem yang berdasarkan pada Demokrasi Ekonomi mencakup 8 program :
 - Program pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila
 - Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara
 - Program Pembaharuan Hukum



- Program peningkatan kualitas manusia
- Program pemerataan pembangunan
- Program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- Program pemeliharaan dan pemantapan stabilitas ekonomi
- Program pelestarian SDA dan lingkungan

Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila

Segi ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata. Partisipasi rakyat dalam kehidupan ekonomi terkait erat dengan partisipasi rakyat dalam politik. Dibidang politik, ditegaskan Pancasila sebagai dasar.

- Langkah-langkah yang diperlukan, meliputi

1. Praktek-praktek konstitusional dan demokrasi

1. Peningkatan mutu infrastruktur politik

1. Pemasyarakatan P-4

1. Penanaman nilai dan sikap demokratis sejak dini

Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

- Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, efisien, dan berdedikasi
- Potensi, inisiatif, dan daya kreasi dikembangkan dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Pemerintah memiliki peranan sebagai penjaga kepentingan umum, penjamin keadilan, dan kemakmuran bersama.

Langkah-langkah yang diperlukan, meliputi

- 1 • Deregulasi dan debirokratisasi dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat
- 2 • Penyempurnaan sistem penggajian, sistem karier, uraian jabatan, sistem pengawasan
- 3 • Restruktutasi (pengaturan kembali)

Program Pembaharuan Hukum Di Bidang-bidang Berikut :

1. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur langsung manusia sebagai obyek-subyek kegiatan ekonomi

Hukum dan perundang-undangan yang mengatur transaksi ekonomi dan institusi ekonomi

Penyempurnaan diperlukan di bidang peradilan, arbitrase dan sumber daya hukum

Program Peningkatan Kualitas Manusia

Demokrasi Ekonomi erat kaitannya dengan Demokrasi Politik, maka kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi juga perlu ditunjang oleh kemampuan berpartisipasi di bidang politik.

Tingkat kemampuan berpartisipasi di bidang politik juga sangat ditentukan oleh tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh sebab itu peranan pendidikan sangat sentral dalam pemantapan baik Demokrasi Ekonomi maupun Demokrasi Politik.

Program Pemerataan Pembangunan

1. Pemantapan
Mekanisme
Anggaran
Negara

Pengembang
an Koperasi

Perluasan
Kesempatan
Kerja

Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Rakyat

Program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi:

1. Penciptaan iklim usaha yang sehat
2. Peningkatan tabungan nasional
3. Peningkatan kemampuan nasional dalam bidang teknologi

Program Pemantapan Stabilitas Ekonomi

Salah satu landasan kebijaksanaan pembangunan nasional adalah ekonomi makro (fiskal, moneter, neraca pembayaran). Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini, ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkesinambungan karena disertai dengan stabilitas yang tetap terkendali.

Asas pokok kebijakan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran yang sampai saat ini dianut adalah

1. Anggaran belanja berimbang yang dinamis
2. Pengendalian uang beredar
3. Sistem devisa bebas
4. Kurs devisa yang mengambang dan terkendali

▶ Program Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

Demokrasi Ekonomi mesyaratkan peningkatan kemakmuran yang dicapai secara berkesinambungan. Ini berarti bahwa, kelestarian kemampuan sumber alam untuk mendukung peningkatan kemakmuran, serta itu mutu lingkungan hidup yang dihasilkan harus dipelihara dan bahkan ditingkatkan.

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pembangunan berwawasan lingkungan.

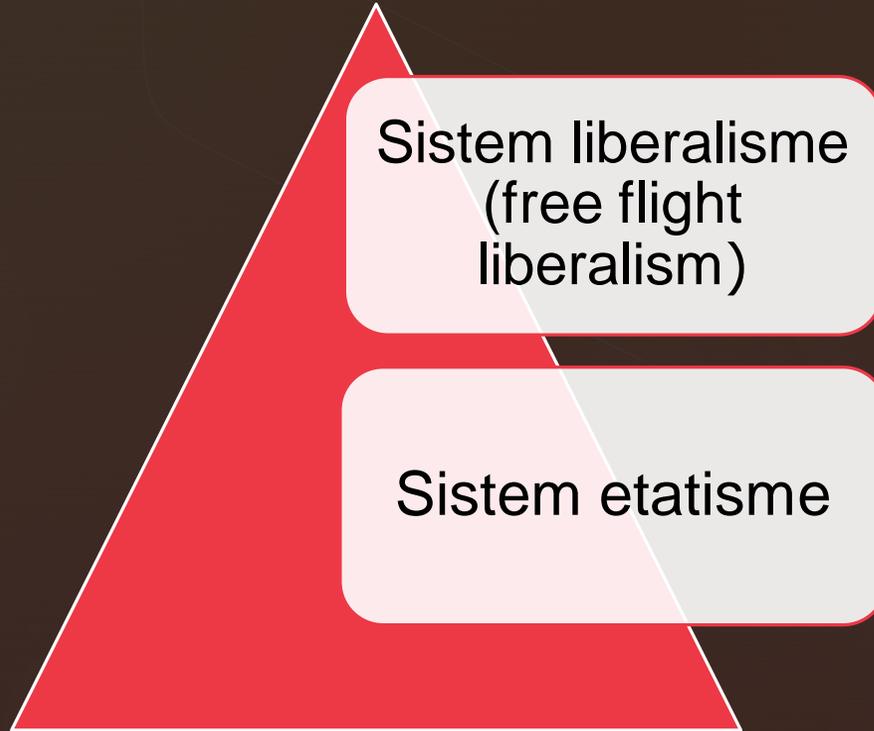
▶ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34

Menyatakan bahwa,

Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini Demokrasi ekonomi mewajibkan negara untuk menghapus kemiskinan absolut.

Demokrasi Ekonomi Harus Dihindari dari..

Terwujudnya :



Pengambilan keputusan ekonomi oleh pelaku ekonomi **dikendalikan** oleh **pemerintah secara tidak langsung dengan :**

- Sistem Insentif
- Sistem Disinsentif

Pemerintah wajib mencegah pemusatan kekuatan ekonomi.

Sistem Insentif

1. Untuk merangsang anggota masyarakat berprestasi digunakan sistem insentif melalui berbagai macam perangkat seperti kebijakan fiskal, moneter, neraca pembayaran, perkreditan tarif dsb.
2. Sistem laba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi yaitu system ekonomi pasar yang terkendali
3. Karyawan diberikan insentif agar bergairan dan selalu berusaha meningkatkan produktivitas
4. Pembangunan yang meningkat memerlukan dana pembiayaan yang semakin besar, maka tabungan masyarakat mutlak perlu ditingkatkan
5. Dalam jangka Panjang, keberhasilan negara mencapai kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi

➤ Pendekatan Penjabaran

- Disusun secara lugas dan luwes dan dengan menghindari perumusan yang kaku dan terlalu terinci tetap didasarkan atas nilai-nilai, tata cara dan tata karma yang terdapat dalam kebudayaan serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri
- Sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia
- Penjabaran dalam bentuk program pelaksanaan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan untur-unsurnya pemerataan pembangunan.

▶ Pendekatan Penjabaran

Penjabaran Demokrasi Ekonomi menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- ❖ sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia
- ❖ dalam bentuk program-program pelaksanaannya

Sistem Ekonomi Berdasarkan Demokrasi Ekonomi

Kelembagaan ekonomi.

Perangkat kebijakan.

Pola pemanfaatan sumber daya.

Distribusi pendapatan.

Proses pengambilan keputusan.

Sistem insentif.

Kelembagaan Ekonomi

Terdapat 3 bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama, yaitu:

- ❖ Usaha negara
- ❖ Koperasi
- ❖ usaha swasta

saling bertinteraksi dan saling bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong dilakukannya investasi, mendorong industri untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang tepat untuk melaksanakan usahanya

▶ Pada Kenyataannya...

Mekanisme pasar tidak selamanya dapat berjalan dengan sempurna, baik karena para pelaku ekonomi tidak seimbang kekuatannya, maupun karena para pelaku ekonomi melakukan persaingan dengan cara-cara tidak sehat.

Karena itu dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi,

Pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan sebaiknya wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.

Peran 3 Bentuk Usaha

Usaha negara berperan sebagai:

- **Perintis** di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta.
- **Pengelola dan pengusaha** di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara
- **Pengelola dan pengusaha** di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- **Imbangan** bagi kekuatan pasar pengusaha swasta
- **Pelengkap** penyediaan barang dan jasa yang belum cukup di sediakan oleh swasta dan koperasi
- **Penunjang** pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Peran 3 Bentuk Usaha

- **Usaha koperasi** bentuk **badan usaha** yang **sesuai dengan ketentuan UUD 1945**, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk **berperan sesuai dengan hakekatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak social**.
- **usaha swasta**, diberi **peranan** yang sebesar-besarnya didalam **bidang-bidang dimana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi memperoleh laba** memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.

▶ **Pembangunan Ekonomi Didasarkan Demokrasi Ekonomi**

- **Sektor Informal** mempunyai **peranan penting sebagai penyedia lapangan kerja, pemberi jasa dan pelayanan kepada masyarakat.**

Pemerintah juga memberi perhatian pada lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat seperti konsumen, rumah tangga dan serikat pekerja,

- Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang penting. Pemerintah memberikan perhatian baik dengan mengusahakan lancarnya mekanisme permintaan dan penawaran maupun penerapan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk melindungi konsumen.

- 
- **Serikat pekerja** merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai **wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.**

Suatu pemerintah yang bersih, berdedikasi, efisien dan efektif serta mempunyai penghayatan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan salah satu syarat yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Hubungan antara pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan

Perangkat Kebijakan

- ❖ Perangkat kebijakan ekonomi mempunyai fungsi terutama, untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi.
- ❖ Pengarahan, bimbingan dan pengendalian oleh Pemerintah terhadap proses-proses ekonomi (produksi, distribusi, penanaman modal dan konsumsi) dilakukan dengan cara-cara yang tidak langsung melalui upaya mempengaruhi permintaan dan penawaran.

- 
- ❖ **Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, moneter dan neraca pembayaran yang tepat untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan harga, mengamankan neraca pembayaran luar negeri, menciptakan iklim usaha yang merangsang penanaman modal, produksi dan penciptaan lapangan kerja,**
 - ❖ **Peranan anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh Pemerintah untuk maksud-maksud:**
 - **Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan**
 - **Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan**
 - **Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi**
 - **Penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat**



Inti proses pemerataan melalui anggaran negara adalah:

- Adanya sistem perpajakan yang adil
- Adanya kebijaksanaan dan mekanisme alokasi anggaran yang efisien dan diarahkan pada pemerataan,

Peran anggaran dapat tercapai apabila sisi perpajakan dan pembelanjaan berfungsi efektif dalam menunjang sasaran pemerataan.



- Peranan anggaran negara dalam menyediakan prasarana dasar bagi pembangunan juga penting peranan ini dibatasi pada prasarana prasarana yang tidak dapat dibangun oleh masyarakat sendiri. Tujuannya adalah agar dana anggaran negara dapat di manfaatkan secara optimal untuk mendukung pemerataan.

Peranan pemerataan ini dapat diambil alih oleh swasta



- ❖ Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan penting untuk memelihara kestabilan ekonomi
- ❖ Kebijakan makro dilengkapi dengan kebijakan mikro
- ❖ Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu alat kebijakan untuk pemerataan

Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki bahwa SEI : sumber daya manusia dalam jumlah dan dengan mutu yang memadai tersebar antara sector dan daerah
- **Pemerintah mengatur** pemanfaatan SDA, **mengarahkan** dan **menciptakan iklim** agar penanaman modal untuk menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menunjang sasaran pemerataan dan stabilitas kelestarian lingkungan hidup.
- Pemerintah mengarahkan pemanfaatan asset yang tidak berwujud (intangible) khususnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan)
- sumber daya perkreditan menunjang laju pertumbuhan eko, stabilitas eko dan menunjang pembangunan secara lebih merata di seluruh Indonesia

Distribusi Pendapatan

- Sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan kemakmuran untuk semua orang bukan kemakmuran orang-orang
- mengakui adanya perbedaan tingkat pendapatan yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat prestasi
- memprioritaskan pada upaya penghapusan kemiskina absolut
- mengutamakan peningkatan pendapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dlm kegiatan produktif dan dengan redistribusi pendapatan
- melakukan pemerataan dalam pemilikan asset baik yang berwujud dan tidak berwujud
- Disediakkannya fasilitas umum (jalan, air bersih, listrik dsb) secara lebih merata sehingga dapat dinikmati juga oleh penduduk yang berpendapatan rendah

Proses Pengambilan Keputusan

Dalam Sistem Demokrasi Ekonomi

- ❑ Menghendaki partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan
- ❑ Pemerintah pusat dan pemda memiliki peran yang saling mengisi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan
- ❑ mekanisme pasar dan proses kebijaksanaan ekonomi berlangsung secara transparan
- ❑ proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka

Penutup

- Pelaksanaan dan pemantapan Demokrasi Ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
- Berhasilnya upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di dalam kehidupan ekonomi Indonesia tergantung dari tekad, semangat, disiplin, dan tindakan nyata dari para penyelenggara negara dan para pelaku ekonomi serta masyarakat.



Sumber: ISEI (1990). Penjabaran
Demokrasi Ekonomi